

POPULISME DI INDONESIA SEBAGAI ANCAMAN POLARISASI MASYARAKAT

Bachtiar Nur Budiman

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37, Jember, 68121
Email: bnbachtiar23@gmail.com

Abstract

This article discusses about populism in Indonesia as a potential threat to cause polarization in the society. It is written as a response of how thriving populism is towards the political and social system in Indonesia. Although populism is still not a familiar word to hear in the society, but the society has to understand this phenomenon because populism already grows to be a political weapon and maneuver by political actors to leverage their names and groups they were organize, especially during the election. However, populism has its dilemma. In one side, it is proven to be effective to leverage the names of certain political actors and gain more support. But in the other side, populism as political strategy could in short polarize and divide the society that would decrease the sense of unity and increase tension, even if the election times has passed. That is why it is urgent to reflect and understand this phenomenon. This article will use literature review to collect data and information as reference to come up with the result and discussion. The writer hopes that this manuscript can be beneficial to anyone who is reading and bring a whole new understanding towards the society.

Keywords: *Populism; Polarization; Society; Politics.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang populisme di Indonesia yang berpotensi menimbulkan ancaman polarisasi masyarakat. Disusun sebagai sebuah respon terhadap bagaimana populisme dapat berkembang secara pesat dalam sistem sosial dan politik di Indonesia. Meskipun populisme bukan merupakan kata yang familiar di masyarakat, namun masyarakat harus mengetahui fenomena ini karena populisme telah menjelma menjadi senjata dan manuver politik oleh aktor politik tertentu untuk menaikkan nama maupun kelompoknya, terutama di masa pemilihan umum. Namun, populisme memiliki dilema tersendiri di satu sisi, populisme terbukti efektif dalam menaikkan nama aktor politik tertentu dan menggaet lebih banyak dukungan. Namun di sisi lain, populisme sebagai strategi berpolitik secara kasar dapat mempolarisasi dan memecah masyarakat yang akan berdampak pada berkurangnya kesadaran akan kesatuan dan meningkatkan potensi konflik, walaupun masa pemilihan umum telah usai. Itulah mengapa masyarakat harus merefleksikan serta mengetahui fenomena ini. Artikel ini akan menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menuju pada sebuah pembahasan dan kesimpulan. Penulis berharap bahwa artikel ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan membawa pemahaman baru pada masyarakat.

Kata Kunci: *Populisme; Polarisasi; Masyarakat; Politik.*

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai populisme telah menjadi hal yang menarik dalam studi ilmu sosial dan ilmu politik. Di Indonesia, populisme menjadi semakin banyak diteliti setelah fenomena pemilihan umum 2014 ketika melibatkan dua kandidat dengan gaya kepemimpinan populis yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto (akan dibahas secara rinci pada bagian ketiga artikel ini). Namun, meski ide, gagasan, atau fenomena populisme telah menjadi tinjauan sejak lama, perbincangan mengenai populisme di kalangan masyarakat umum, khususnya di Indonesia masih sangat sedikit didengar. Hal ini terjadi karena kurang tertariknya masyarakat umum dalam membahas ataupun memperbincangkan dinamika politik Indonesia, karena secara umum masyarakat Indonesia masih percaya bahwa politik adalah sekedar perebutan kekuasaan oleh elit yang tidak mungkin orang awam memahaminya dan tidak ada ketertarikan untuk menjadikannya sebagai topik perbincangan. Sehingga, populisme hanya sekedar menjadi bahan penelitian atau pembahasan sebuah artikel ilmiah yang meneliti tentang fenomena sosial dan politik dan jarang menjadi isu atau bahan perbincangan di kalangan masyarakat umum. Padahal, fenomena populisme dapat dirasakan kehadirannya dan mempengaruhi tatanan sosial dan politik di suatu negara yang membuat topik ini cukup memberikan urgensi. Hal inilah yang diharapkan bahwa dengan kontribusi penulis memuat topik populisme dalam sebuah artikel maka semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk membaca serta memahami fenomena ini.

Argumen dan teori tentang populisme telah dimuat di dalam artikel-artikel penelitian serta buku-buku sebelumnya. Pertama, populisme dapat dipandang sebagai sebuah proses yang alami dari dinamika demokrasi di suatu negara. Hal ini diakibatkan oleh sistem perwakilan yang semakin korup dan dikuasai elit politik membuat gerakan populis muncul sebagai

ekspresi langsung rakyat terhadapnya. Di sisi lain, populisme justru dapat menghambat pertumbuhan demokrasi dalam konteks Indonesia karena kurang terinstitusionalisasinya demokrasi di Indonesia (Eby Hara, 2018). Dengan nada yang sama, muncul tinjauan kritis tentang populisme dan mempertanyakan apakah populisme merupakan sebuah cara mencapai pemerintahan yang berkedaulatan rakyat atau hanya sebuah cara baru dalam memperebutkan kekuasaan (Mustofa, 2019). Kemudian, Kenny dalam bukunya *Populism in Southeast Asia* menyatakan bahwa terdapat dua kelompok yang mendefinisikan populisme secara berbeda. Kelompok pertama mendefinisikan populisme sebagai ideologi, dan kelompok kedua mendefinisikan populisme sebagai senjata atau strategi politik yang bertujuan memobilisasi massa untuk mendapatkan dukungan dengan menghilangkan jarak antara figure populis (sosok pemimpin yang kharismatik) dengan pengikutnya (Kenny, 2019: 9). Selanjutnya, bahwa aktor politik sesungguhnya menggunakan ideologi-ideologi kunci yang terbagi menjadi lima untuk menjadi figur populis. Kelima ideologi kunci ini adalah memperluas makna kedaulatan rakyat, membangun advokasi untuk rakyat yang tertindas, strategi menyerang elit yang korup, mengucilkan kelompok lain yang berkedudukan sama secara horizontal, serta mengembalikan keadaan atau ruang yang telah hilang dalam keadaan saat ini (Engesser et. al, 2016). Terakhir, Wirajuda mendefinisikan populisme sebagai sebuah suara protes serta fenomena sementara yang tetap harus ditinjau serta diperhatikan oleh demokrasi (Wirajuda, dalam Wisnu, 2018: 21-22).

Beberapa penelitian diatas telah menjabarkan tentang bentuk-bentuk populisme, bagaimana populisme mengancam demokrasi, adanya kelompok-kelompok yang mendefinisikan populisme secara berbeda, populisme yang dikaitkan dengan memiliki lima ideologi kunci, hingga bagaimana demokrasi harus tetap menjadi

pengawas serta berada diatas populisme. Menurut penulis, salah satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk ditinjau selain ancaman terhadap demokrasi adalah bagaimana populisme dapat menyebabkan sebuah polarisasi dan perpecahan yang berujung konflik jika tidak disertai dengan pemahaman serta masih memelihara prasangka buruk terhadap kelompok lawan yang berlanjut dan bertumbuh menjadi narasi perlawananmeski kontestasi pemilihan umum telah berakhir. Penulis percaya bahwa dalam konteks Indonesia yang multikultural dan heterogen pasti akan sangat mudah dikotak-kotakkan atas nama identitas. Hal ini akan mengganggu atau bahkan mencoreng cita-cita luhur bangsa untuk menjadi sebuah negara yang bersatu di tengah keberagaman. Oleh karena itu, artikel ini muncul untuk mengisi *gap* atau kekosongan penelitian-penelitian sebelumnya tentang populisme serta menyatakan akan adanya ancaman dalam menimbulkan polarisasi di masyarakat sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kesadaran pembaca serta masyarakat untuk memiliki *good citizenship*, yaitu menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, menghilangkan prasangka, serta menyadarkan bahwa populisme yang dijunjung oleh figur politik dalam pemilihan umum bukanlah sebuah alasan untuk menjadi masyarakat yang terpecah-belah.

Artikel ini disusun menggunakan metode studi pustaka untuk mendapatkan berbagai data dan informasi terkait topik. Sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah buku dan jurnal penelitian ilmiah. Adapun cara untuk memberikan penjelasan serta pemahaman yang komprehensif, artikel ini akan dibagi menjadi lima bagian, dimana bagian pertama merupakan latar belakang. Bagian kedua artikel ini adalah pendefinisian populisme secara jelas yang disertai tinjauan tentang hubungan antara populisme dan demokrasi. Kemudian dilanjutkan bagian ketiga yang membahas tentang bagaimana fenomena serta pola populisme di Indonesia, bagian

keempat menjelaskan bagaimana populisme dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat, dan bagian kelima merupakan konklusi atau kesimpulan.

B. Pembahasan

1. Populisme: Sebuah Strategi Politik di tengah Perkembangan atau Kemunduran Demokrasi?

Populisme merupakan sebuah istilah yang multitafsir. Namun, yang merupakan inti dari populisme adalah bagaimana seseorang bisa menempatkan dirinya sebagai “pemimpin yang kharismatik” serta mewakili kelompok yang mengidentifikasikan diri sebagai “rakyat yang sesungguhnya” atau “orang biasa” untuk melawan sistem yang telah diisi oleh elit-elit politik yang korup dan menjadi penghambat kesejahteraan masyarakat. Dalam definisi ini, populisme dapat disebut sebagai gerakan. Gerakan populis hadir sebagai respon secara langsung dari “rakyat biasa” terhadap sistem sosial, politik, birokrasi, serta representasi yang semakin korup dan dikendalikan oleh elit-elit politik serta oligarki (Eby Hara, 2018). Keberhasilan populisme menjelma sebagai sebuah gerakan sangat bergantung pada pemimpin yang berkharisma dari pencetus gerakan itu sendiri. Bagaimana pemimpin tersebut bisa membawa serta membangun narasi-narasi yang mewakili perasaan serta keadaan yang sedang dialami rakyat biasa sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang korup. Dalam definisi ini, populisme dapat didefinisikan sebagai sebuah gaya komunikasi yang menargetkan rakyat biasa sebagai cara mendapatkan dukungan. Selanjutnya, gerakan populis akan mendapatkan penerimaan ataupun tantangan berupa penolakan.

Gerakan populis yang mendapat penerimaan secara luas akan memiliki banyak dukungan sehingga dapat menjadikan gerakan tersebut menjadi mayoritas yang otomatis akan menjadi representasi rakyat yang sesungguhnya. Jika hal ini terjadi, pemimpin kharismatik gerakan populis ini akan terpilih menjadi pemimpin seluruh negara serta mendapatkan kesempatan untuk melakukan reformasi struktural terhadap negara tersebut. Dalam hal ini, populisme dapat didefinisikan sebagai sebuah strategi politik aktor tertentu, karena mengandung sebuah kiat-kiat untuk mencapai suatu tujuan. Terakhir, jika gerakan populis dalam keadaan tertentu dapat menjelma menjadi sebuah kelompok meski bukan mayoritas tetapi tetap dapat menuai ketegangan antarkelompok yang berpotensi menyebabkan polarisasi, maka populisme dapat didefinisikan sebagai fenomena sosial.

Sebuah pertanyaan muncul ketika membahas populisme sebagai salah satu fenomena, yaitu apakah populisme berkembang serta dengan mudah menjustifikasi keberadaannya karena berkembangnya demokrasi suatu negara atau justru karena kemunduran atau penurunan kualitas demokrasi negara tersebut? Pertama, sebagian peneliti berpendapat bahwa salah satu faktor yang paling mempengaruhi kemunculan populisme adalah berkembangnya dinamika demokrasi di suatu negara. Saat ini, dinamika demokrasi telah berada di tahap perwakilan rakyat yang tinggi (Mustofa, 2019). Hal ini menyebabkan pemilihan umum kerap disebut sebagai sumber utama partisipasi politik atau hak masyarakat dalam kebebasan menentukan nasib suatu negara melalui memilih wakil rakyat (Mustofa, 2019). Namun, populisme dan demokrasi memiliki hubungan

yang kontradiktif serta menjadi banyak perdebatan diantara para peneliti ilmu sosial. Hal ini dikarenakan istilah serta parameter kedua ide ini masih belum pernah jelas dalam penemuannya (Kaltwasser, 2011). Selain itu, dilema juga terjadi mengingat populisme menyebabkan sebuah kontestasi yang tinggi dalam panggung politik suatu negara (Moffit & Tormey, 2013). Dalam keadaan tertentu kontestasi tersebut dapat menjelma menjadi prasangka antar kelompok yang berpotensi menyebabkan konflik. Namun, Robert Dahl dalam pemikiran lamanya yang dituangkan dalam buku *Polyarchy: Participation and Opposition* mengungkapkan bahwa salah satu dari delapan dimensi demokrasi adalah tingginya kontestasi yang memungkinkan terjadinya perimbangan serta sikap saling mengawasi satu sama lain dengan memberikan gagasan-gagasan alternatif sehingga tidak ada suatu kelompok yang mendominasi kelompok lain (Dahl, 1971: 4).

Untuk mengimbangi perdebatan, sebagian peneliti lain berpendapat bahwa sejak 13 tahun yang lalu, demokratisasi telah mengalami kemunduran yang disebabkan oleh maraknya praktik korupsi, rendahnya penegakan hukum, dan kemunculan populisme sebagai *trend* (Hilmy, 2020). Dinamika politik suatu negara yang sangat kompleks membuat demokrasi menjadi sebuah konsep abstrak yang pada dasarnya mengedepankan kebebasan terutama dalam berpolitik. Kebebasan yang abstrak tersebut kemudian berpengaruh terhadap penurunan kualitas moral dalam masyarakat (Hilmy, 2020). Sehingga, kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh aktor tertentu untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Berbagai contoh kasus telah

menunjukkan bagaimana populisme muncul sebagai senjata politik untuk memperoleh kekuasaan serta memberikan dampak polarisasi di masyarakat. Salah satunya adalah yang terjadi di India, ketika partai populis BJP yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi mengeluarkan undang-undang *Citizen Amandement Bill* yang memperkuat narasi tentang sektarianisme serta menyebabkan penyerangan terhadap sejumlah masjid di India (Hilmy, 2020). Kasus diatas menunjukkan bahwa populisme hadir karena rendahnya kualitas demokrasi yang membangun narasi bahwa seakan-akan *majority rule* merupakan suatu hal yang absolut dan tidak dapat diganggu gugat, melupakan konteks kemajemukan identitas di Negara tersebut. Kemungkinan lain adalah adanya ketidaksesuaian konteks demokrasi sehingga Negara yang memiliki banyak identitas dan multikultural harus dipaksa mengadopsi nilai-nilai demokrasi dari Negara-Negara Barat yang telah menunjukkan dirinya sebagai Negara-Negara yang maju sebagai acuan untuk hidup berbangsa dan bernegara.

Indonesia sendiri merupakan sebuah negara demokrasi yang dibuktikan dengan Pancasila sebagai dasar negara dimana pada Sila keempat dijelaskan bahwa sistem demokrasi di Indonesia menganut konsep permusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini, demokrasi yang dianut oleh Indonesia berbeda dengan demokrasi yang diimplementasikan di sebagian besar Negara Barat. Demokrasi di Barat yang disebut juga sebagai Demokrasi Liberal hanya didasari oleh cara berpikir yang rasional sehingga menempatkan individualisme, sekulerisme, serta antroposentris sebagai dasar menentukan kesadarannya (Djarsono, 2013). Sehingga, demokrasi dibentuk

secara kuantitatif atau suara mayoritas (Djarsono, 2013). Sementara itu, Demokrasi Pancasila sangat didasarkan pada kesadaran akan kesamaan identitas, rasa senasib sepenanggungan yang selain didasari oleh pikiran-pikiran rasional tetapi juga didasari nilai-nilai religius atau keagamaan (Djarsono, 2013). Penjelasan ini membuktikan bahwa sebagian besar Negara-Negara Demokrasi dianggap sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta kebebasan individual, mulai dari kebebasan berekspresi hingga berpartisipasi politik.

Demokrasi memang selalu identik dengan kebebasan berekspresi serta kesempatan dalam berpartisipasi politik. Pemilihan umum merupakan pintu bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menentukan nasib suatu negara dengan memilih pemimpinnya. Pemilihan umum memang membuat masyarakat terbelah menjadi dua atau beberapa kubu dengan preferensi kandidat masing-masing. Selain itu, seseorang yang memiliki preferensi kandidat tertentu secara tidak langsung pasti akan “membela” kandidat tersebut yang terkadang mengundang perdebatan jika bertemu dengan orang lain dengan preferensi kandidat yang berbeda. Perdebatan-perdebatan ini merupakan hal yang wajar terjadi karena setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Namun yang harus digarisbawahi adalah seseorang tidak seharusnya memaksakan kehendak atas alasan “kebebasan” dan “demokrasi” kepada orang lain yang memiliki preferensi yang berbeda. Karena pada dasarnya kebebasan seseorang memiliki batasan yaitu sejauh tidak mengusik kebebasan orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Benjamin Franklin “*only virtuous*

people are capable of freedom” (Thorgeirsdottir, 2011: 563), yang berarti hanya orang-orang tertentu yang bermoral baik serta berbudi luhur yang “pantas” atau bisa bertanggung jawab atas kebebasannya. Karena, kebebasan membutuhkan sebuah kontrol diri. Sebuah dorongan moral untuk tidak memaksakan kehendak demi mencegah sebuah ketegangan.

Konsep ini sangat relevan ketika kita kaitkan dengan berbagai gerakan populis yang dalam perjalanannya seringkali menimbulkan ketegangan antarkelompok karena dibangun berdasarkan narasi-narasi kebencian sehingga semakin menguatkan stigma di kalangan masyarakat bahwa politik tidak bertujuan untuk kesejahteraan ataupun ketertiban, melainkan hanya sekedar perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Hal ini diperparah dengan pemikiran yang terlalu memuja sistem demokrasi Barat sebagai sistem terbaik yang dapat memajukan suatu Negara. Selain itu, rendahnya memasukkan nilai-nilai demokrasi yang kualitatif-kuantitatif (musyawarah dahulu lalu voting) di Indonesia membuat sistem Demokrasi Pancasila telah mengalami erosi dan mulai meniru Demokrasi gaya Barat. Hal ini dikarenakan tidak mungkin dilakukan sebuah musyawarah untuk memilih pemimpin di Indonesia, dan walaupun setiap perwakilan bisa merepresentasikan suara suatu kelompok tertentu maka pemerintahan akan tersusun sangat lamban karena harus mengakomodir seluruh suara. Hal ini menjadi faktor utama mengapa Demokrasi di Indonesia saat ini sekedar menjadi Demokrasi yang kuantitatif dan memuja *majority rule*. Hal ini dengan mudah dimanfaatkan oleh para figur-figur politik untuk mengotak-kotakkan masyarakat atas nama identitas yang menyebabkan keadaan menjadi sangat rawan

terhadap konflik. Padahal, tidak ada yang lebih baik serta mulia selain mencapai ketertiban, persatuan, serta kesatuan dalam suatu bangsa. Persatuan dan kesatuan tetap harus dijadikan tujuan terakhir dalam suatu bangsa, terlepas dari perbedaan identitas yang beragam. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap sadar bahwa sebagai Bangsa Indonesia, kita memiliki identitas, budaya, serta cara berpikir sendiri dan tidak seharusnya menjadikan Barat sebagai kiblat. Kesadaran ini harus dibangun dengan cara-cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita luhur bangsa.

Terlepas dari populisme yang menjelma sebagai sebuah gerakan maupun yang telah menjadi fenomena sosial, inti dari populisme adalah kemunculan seseorang yang memiliki kehendak untuk menjadikan dirinya sebagai sosok reformis yang kharismatik serta didukung oleh kemampuan komunikasinya dalam memperoleh dukungan serta memantik terciptanya sebuah gerakan populis yang disatukan oleh ide-ide atau narasi-narasi tentang *status quo* yang sudah tidak sesuai atau tidak menunjukkan adanya kemajuan bagi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang populisme, demokrasi, serta identitas Bangsa Indonesia, penulis menyatakan bahwa populisme merupakan sebuah strategi atau senjata politik yang digunakan oleh aktor politik untuk memperoleh kekuasaan demi tujuan tertentu.

2. Populisme di Indonesia

Pemilihan Umum Indonesia tahun 2014 telah menjadi saksi persaingan populisme diantara dua kandidat Presiden. Pada saat itu, Joko Widodo mengklaim bahwa sistem birokrasi di Indonesia telah menjadi

sangat korup. Ia pun menggunakan narasi “reformasi birokratis” untuk membantu rakyat biasa yang seringkali kesulitan dalam mendapatkan akses di bidang pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik lainnya. Sementara itu, Prabowo Subianto membangun narasi bahwa orang-orang seperti petani, nelayan, dan buruh adalah rakyat yang sesungguhnya. Prabowo mengklaim bahwa sistem pemerintahan telah dikotori oleh sekelompok elit pemilik modal asing yang mencari uang dengan menguras sumberdaya yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, narasi yang dikembangkan adalah narasi “anti-asing” (Eby Hara, 2018). Tanpa disadari, memilih salah satu kandidat pada Pemilu 2014 membuat seseorang menjadi bagian dari salah satu kelompok populis yang akan melakukan reformasi sistem. Karena, keberpihakan dalam pemilu termasuk dalam sebuah perilaku politik yang bisa berubah-ubah sesuai preferensi individual (Huntingtin & Nelson, dalam Mufti, 2019: 91). Menurut penulis, perilaku politik seperti ini sangat dipengaruhi oleh narasi yang dimainkan oleh setiap kandidat yang akan menjelma menjadi sebuah identitas. Contohnya, Prabowo yang membawa narasi “anti-asing” yang secara tidak langsung, pendukung atau pemilih Prabowo dapat disebut sebagai “nativisme” yaitu kelompok yang menjunjung tinggi nilai, budaya, dan identitas lokal atau nasional diatas identitas asing (Eby Hara, 2018).

Munculnya populisme di Indonesia sangat berhubungan dengan fakta bahwa telah terjadi ketimpangan serta ketidakadilan dalam sistem demokrasi desentralisasi yang telah dibangun sejak awal masa reformasi (Madung, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa populisme muncul di Indonesia sebagai sebuah strategi politik oleh para figur populis ditengah

kemunduran demokrasi. Selain itu, selain memainkan narasi anti-elit, kelompok populis juga membangun narasi bahwa kelompok merekalah satu-satunya yang mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya yang secara tidak langsung gerakan ini mengidentifikasikan dirinya sebagai antipluralis (Madung, 2018). Hal ini dapat menimbulkan masalah karena Indonesia merupakan negara yang plural serta memiliki beragam identitas serta banyak aspirasi-aspirasi yang seharusnya didengar serta diakomodasi. Apalagi, kasus Pemilihan Umum 2014 melibatkan dua figur populis yang berarti terdapat dua kelompok populis besar yang mengidentifikasi dirinya sebagai “rakyat yang sesungguhnya”. Disini telah terjadi pemisahan identitas menjadi dua kelompok besar. Lantas, bagaimanakah dengan identitas-identitas lain yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengutarakan aspirasi-aspirasinya seperti etnis serta kelompok kultural? Bagaimana jika ternyata aspirasi-aspirasi mereka tidak terwakilkan oleh kelompok populis yang telah mengklaim tempat sebagai “rakyat yang sesungguhnya”? hal ini tentu telah menimbulkan penindasan baru dan akan sangat pasti menciptakan kesempatan aktor-aktor lain untuk memulai gerakan serupa sehingga yang terjadi adalah terciptanya banyak identitas yang merasa tertindas yang interaksi antarkelompoknya sangat rentan terhadap gesekan-gesekan yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan konflik.

Tidak terwakilnya aspirasi sebagian kelompok oleh gerakan populis kubu Jokowi maupun Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Umum 2014 terbukti setelah pada tahun 2017 muncul sebuah gerakan populisme islam yang dibawa oleh FPI (Front

Pembela Islam). Populisme yang dibawa oleh FPI mengidentifikasi bahwa kelompok elit di Indonesia telah menjadi kelompok yang korup serta didominasi oleh etnis Tionghok yang ingin menguasai Indonesia, sehingga narasi yang dibangun adalah narasi untuk menyatukan *ummat* untuk melawan orang-orang kafir yang diidentifikasi sebagai kelompok etnis Tionghok (Eby Hara, 2018). Populisme Islam di Indonesia semakin menemukan tempatnya ketika menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, kandidat beretnis Tionghoa yaitu Basuki Tjahaja Purnama dianggap melakukan penistaan agama dengan menafsirkan Ayat Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51 dalam salah satu pidato kampanyenya (Pratama, 2021).

Peristiwa tersebut menjadi kesempatan bagi figur populis FPI yaitu Rizieq Shihab untuk melakukan konstruksi agama dengan memojokkan etnis Tionghoa dengan memantik kemunculan gerakan 212 (Pratama, 2021). Dalam konteks yang lebih luas, gerakan 212 muncul karena semakin rendahnya representasi kaum muslim diantara sistem politik maupun ekonomi di Indonesia, serta menguatnya kemunculan borjuasi etnis Tionghoa khususnya di bidang ekonomi yang mendominasi serta mengalienasi kelompok pribumi yang diidentifikasi sebagai umat Islam (Mudhoffir et. al, 2017). Kemampuan gerakan 212 dalam memobilisasi massa untuk menduduki kawasan Monumen Nasional di Jakarta menunjukkan bahwa populisme Islam yang dibawa oleh gerakan 212 sukses menarik perhatian segelintir umat Islam serta masyarakat secara umum. Mobilisasi massa gerakan 212 seakan sukses dalam membangun narasi kebencian terhadap etnis Tionghoa yang dianggap telah mendominasi di

Indonesia. Peristiwa ini lagi-lagi menunjukkan bahwa selain identitas politik, masyarakat Indonesia juga sangat mudah dipecah atas nama identitas agama dan etnis, yang juga sama sekali tidak mencerminkan identitas Bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang multikultural serta multiidentitas, yang seharusnya mengedepankan komunikasi serta membangun pemahaman bersama untuk mencegah ketegangan.

Ketiga fenomena populisme di Indonesia yang telah dibahas mengingatkan kita bahwa populisme merupakan sesuatu yang dapat muncul serta menjelma menjadi sebuah narasi perlawanan kapan saja dan dimana saja jika keadaan di masyarakat tetap tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang populisme. Meskipun kehadiran populisme di satu sisi dapat mengingatkan masyarakat bahwa terdapat sistem yang korup yang harus segera direformasi, namun para figur populis seharusnya mengurangi atau bahkan tidak menggunakan narasi-narasi kebencian serta mencari suatu kelompok untuk disalahkan, direndahkan, maupun dijelek-jelekkan. Hal ini harus sangat dipertimbangkan karena dampak polarisasi yang diberikan akan selalu lebih besar dibandingkan dampak reformasi itu sendiri, yang telah terbukti kejadiannya bahwa hingga saat ini narasi-narasi kebencian terhadap pendukung Jokowi maupun oposisinya, ataupun kebencian terhadap etnis Tionghoa yang masih membekas hingga saat ini masih menjadi penghambat untuk melakukan reformasi yang pada awalnya diharapkan akan menciptakan perubahan yang positif serta kesejahteraan.

3. **Populisme Menimbulkan Polarisasi: Kampanye Hitam, Perkembangan Teknologi serta Budaya Konsumsi**

Kedua bagian sebelumnya telah membahas bagaimana populisme secara agresif dapat memecah-belah masyarakat serta mempertajam perbedaan akibat pengelompokan identitas yang disertai dengan sikap nativisme, menganggap kelompok atau identitas sendiri berada lebih superior dibandingkan dengan kelompok yang lain, serta sentimen atau narasi kebencian yang berusaha dibangun oleh figur populis untuk memperoleh dukungan. Pembahasan dan analisis bagian-bagian sebelumnya terfokus pada gerakan populis itu sendiri beserta kecenderungan seorang figur populis dalam memainkan narasinya. Dalam bagian ini, penulis akan menjabarkan sudut pandang dari masyarakat secara umum, bagaimana bisa masyarakat sangat mudah dipecah karena identitas, serta faktor yang mempengaruhi populisme sangat cepat berkembang serta memperoleh banyak dukungan di kalangan masyarakat.

Secara garis besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era modern saat ini, perkembangan teknologi telah bisa disebut mapan dan hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap teknologi tersebut. Sebagaimana dilansir dari internetworldstats.com, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 76,8% dari total populasi (76,8% dari total populasi menunjukkan bahwa ada sekitar 212,35 juta jiwa pengguna internet dari seluruh jumlah penduduk yaitu 276,3 juta jiwa. Hasil data ini membuat Indonesia menduduki urutan ke-15 se-Asia dalam hal penggunaan internet di kalangan masyarakat. Sumber: internetworldstats.com). Dari data tersebut, kita bisa menyimpulkan

bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah bisa mendapatkan akses terhadap segala macam informasi dengan mudah. Selain itu, dilansir dari kompas.com yang mendasarkan informasinya pada data yang di rilis oleh agensi marketing asal Inggris *We Are Social* dalam laporan bertajuk *Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital* menunjukkan bahwa sebanyak 61,8% dari keseluruhan penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial mulai dari *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan media sosial lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia menggunakan media sosial yang pada esensinya adalah sebuah *platform* untuk mendapatkan informasi, melakukan interaksi, hingga menjadi hiburan di waktu luang.

Besarnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah melekat terhadap teknologi serta sirkulasi informasi yang menyertainya. Teknologi informasi seperti internet dan media sosial telah membuat masyarakat bisa memperoleh informasi secara cepat. Namun, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah seluruh atau sebagian besar dari pengguna teknologi di Indonesia telah memanfaatkan teknologi secara bijak? Menyikapi hal ini, statistik yang dirilis perusahaan teknologi *Microsoft* kembali menunjukkan data bahwa dalam hal *Digital Civility Index* (DCI) atau tingkat kesopanan pengguna media sosial di Indonesia menduduki peringkat 29 dari 32 negara di kawasan Asia Tenggara. Data tersebut menunjukkan bahwa disamping jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang sangat banyak, ternyata sebagian besar dari pengguna itu pula masih belum bisa

memanfaatkan media sosial secara bijak, dalam artian berinteraksi antara satu dengan yang lain dengan baik tanpa merendahkan, menggunakan kata-kata yang baik, serta membaca secara keseluruhan sebelum menyebarkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan populisme, masyarakat Indonesia bisa menjadi sasaran empuk untuk menggaet dukungan oleh figur-figur populis yang ingin memperoleh kekuasaan dengan taktik penggunaan media sosial.

Masyarakat Indonesia secara umum telah hidup ditengah modernitas. Modernitas seringkali dikaitkan dengan kemajuan, seperti kemampuan berpikir masyarakat yang lebih rasional sehingga bisa membentuk institusi-institusi yang lebih mapan dalam struktur sosial, ekonomi, maupun politik (Muzaini, 2014). Proses untuk mencapai sebuah modernitas adalah modernisasi, yang didefinisikan sebagai proses transisi masyarakat mulai dari bentuk tradisional ke bentuk modern yang melibatkan industrialisasi masif, spesialisasi, sekularisasi, diferensiasi sosial, serta rasionalisasi sehingga terjadi perubahan dari bentuk masyarakat tradisional yang homogen menjadi masyarakat dengan berbagai latar belakang atau masyarakat perkotaan yang rumit dan heterogen (Abraham, dalam Muzaini, 2014). Dalam prosesnya, modernitas menciptakan sebuah kebudayaan baru yaitu konsumerisme yang artinya pada masa modern saat ini, seseorang akan lebih dinilai berdasarkan barang yang dikonsumsi, bukan lagi dinilai berdasarkan apa yang bisa dihasilkan seseorang (Octaviana, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat telah bergeser, bahwa semakin banyak mengonsumsi maka semakin baik pula penilaian orang lain

terhadapnya karena dianggap mampu atau memiliki sumberdaya lebih.

Konsumsi bukan hanya berbentuk konsumsi barang, tetapi juga konsumsi non-barang yang dapat menaikkan penilaian. Salah satunya adalah konsumsi informasi. Saat ini, kebutuhan manusia terhadap informasi yang *up-to-date* telah banyak terpenuhi oleh perkembangan teknologi. Sehingga, informasi-informasi mulai dari *infotainment*, informasi sosial, ekonomi, dan politik menjadi sangat mudah diakses dengan banyaknya media-media yang melaporkannya. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat telah hidup dibawah budaya konsumerisme, maka yang terjadi adalah mereka akan melakukan konsumsi informasi tanpa filterisasi moral dari informasi tersebut. Hal ini menyebabkan banyak bermunculannya *fake news* atau berita palsu yang semakin marak karena kecenderungan konsumsi masyarakat yang tinggi dan tidak disertai kemampuan filterisasi informasi yang bijaksana. Dalam kaitannya dengan gerakan populis, kebudayaan atau persepsi yang sudah menjamur seperti ini akan sangat mudah dimanfaatkan oleh figur populis untuk melakukan *black campaign* atau kampanye hitam. Kampanye hitam seringkali dilakukan dalam bentuk-bentuk penyebaran berita *hoax* yang tujuannya tidak lain adalah untuk mempolarisasi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berlawanan. Parahnya, seringkali berita-berita *hoax* yang dibawa oleh kampanye hitam mengandung unsur-unsur identitas seperti suku, agama, ras, dan adat-istiadat (Budiman, 2014).

Populisme, dalam batasan tertentu akan selalu menggunakan kampanye hitam sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan. Istilah

kampanye hitam sendiri bermakna melakukan kampanye dengan cara yang buruk, yaitu dengan menyebarkan sisi buruk dari politikus agar nama baik politikus tersebut tercemar yang akan berdampak pada menurunnya dukungan (Budiman, 2014). Salah satu contoh beredarnya kampanye hitam secara luas adalah pada saat Pemilihan Umum 2014, dimana kedua kandidat baik Jokowi maupun Prabowo memperoleh narasi-narasi buruk akibat kampanye hitam yang dilontarkan terhadap satu sama lain. Cara kampanye hitam ini sama sekali tidak sesuai dengan aturan normatif seperti yang tertulis pada UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya dilakukan dengan cara meyakinkan pemilih melalui visi, misi, serta program kerja pasangan calon dalam mewujudkan pembangunan (Budiman, 2014). Selain itu, dampak yang dihasilkan dari melakukan kampanye hitam juga sangat berbahaya di kalangan masyarakat umum. Kita kaitkan saja dengan fakta bahwa saat ini masyarakat yang telah terdoktrin bahwa seseorang akan lebih dilihat karena apa yang dikonsumsi, maka ketika seseorang itu mengonsumsi suatu informasi tanpa melakukan filterisasi, maka yang terjadi adalah orang tersebut akan menyebarkan berita tersebut bahkan sebelum membacanya secara tuntas. Sementara itu, para penerima informasi juga pasti akan memberikan tanggapan-tanggapan serta komentar-komentar yang tidak pantas, dan dalam sebagian kasus membawa-bawa unsur identitas dengan menjelek-jelekkan identitas lain yang memantik terjadinya pertengkaran serta gesekan-gesekan antarkelompok. Berdasarkan rasional tersebut, maka dapat diketahui bahwa populisme merupakan salah satu

penyebab terjadinya polarisasi di masyarakat.

C. Simpulan

Populisme, dapat menyebabkan polarisasi sosial di masyarakat karena dibangun atas narasi kebencian oleh kelompok satu terhadap kelompok yang berkuasa sehingga populisme kerap kali mendapat dukungan. Kemunculan populisme merupakan akibat dari kemunduran atau menurunnya kualitas demokrasi di suatu negara yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai *order* dalam masyarakat, namun hanya menekankan bahwa esensi demokrasi adalah kebebasan. Persepsi seperti inilah yang harus diperbaiki, terutama dalam konteks keberagaman dan kesatuan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Maka, beradaptasi dengan teknologi seharusnya membuat kita semakin bijak dalam komunikasi daring terutama sosial media, mengingat kualitas *Digital Civility Index* masyarakat Indonesia masih sangat rendah dan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih tidak bisa bijak dalam bermedia sosial. Gesekan-gesekan yang terjadi tersebut akan sangat mudah dibawah ke ranah publik diluar fasilitas daring, seperti memulai gerakan, membangun narasi buruk, serta pertikaian yang disebabkan oleh konflik sebagai akibat yang dibawa oleh populisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. (2014). Kampanye Hitam Pemilu Presiden 2014. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, VI(11), 17–20.
- Engesser, S., Ernst, N., Esser, F., & Büchel, F. (2017). Populism and social media: how politicians spread a fragmented ideology. *Information Communication and Society*, 20(8), 1109–1126. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697>
- Hara, A. E. (2018). *Digital Repository*

- Universitas Jember Populism in Indonesia and its Threats to Democracy Digital Repository Universitas Jember*. 129(Icsps 2017), 106–111.
- Hilmy, M. I. (2020). Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 145–156.
<https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13080>
- Madung, O. G. (2018). Populisme, Krisis Demokrasi, Dan Antagonisme | Populism, the Crisis of Democracy, and Antagonism. *Jurnal Ledalero*, 17(1), 58.
<https://doi.org/10.31385/jl.v17i1.12958-76>
- Moffitt, B., & Tormey, S. (2014). Rethinking populism: Politics, mediatisation and political style. *Political Studies*, 62(2), 381–397.
<https://doi.org/10.1111/1467-9248.12032>
- Mufti, M. (2013). *Teori-Teori Politik*. Pustaka Setia. Jakarta
- Mustofa, M. U. (2019). Tinjauan kritis populisme di indonesia. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Banndung*, 3(1), 70–84. Retrieved from <http://unibba.ac.id/ejournal/index.php/jisipol/article/view/8>
- Muzaini, M. (2014). Perkembangan Teknologi Dan Perilaku Menyimpang Dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 48–58.
<https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2617>
- Octaviana, R. (2019). *Konsep konsumerisme masyarakat modern dalam kajian Herbert Marcuse* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pratama, D. B. (2021). Populisme Islam Dalam Gerakan 212 (Studi Kasus: Lima Organisasi Keagamaan). *Saskara - Indonesian Journal of Society Studies*, 1(1), 1–26. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jrs/article/view/20387>
- Thorgeirsdóttir, Herdís. (2011) “Only a Virtuous People are Capable of Freedom”: Constitutional Principles and Preceding Causes of the Crash in Iceland. *Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson*, 563–588
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Integrasi. *Transnasional*, 4(2), 881–894. Retrieved from <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1211/1202>
- WARE, A. (1974). Polyarchy. *European Journal of Political Research*, 2(2), 179–200.
<https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1974.tb01237.x>
- Wisnu, D. (2018). *Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad ke 21*.
- Yasih, Mudhoffi, H. (2017). Populisme Islam dan Tantangan. *Prisma : Bangkitnya Populisme Dan Krisis Demokrasi*, 36(3), 48–60.